

PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI PENDIDIKAN JARAK JAUH DALAM UPAYA PEMBANGUNAN MASYARAKAT INDONESIA BERBASIS PENGETAHUAN

Aminudin Zubairi dan Effendi Wahyono

Pengantar

Makalah ini membahas konteks, kebutuhan serta perkembangan dan kontribusi pendidikan jarak jauh (PJJ) dalam upaya pembangunan masyarakat modern Indonesia berbasis pengetahuan. Kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, teknologi dan budaya menjadikan PJJ sebagai suatu kebutuhan yang tidak dihindari dalam upaya meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk mengikuti pendidikan dalam berbagai jenjang, jalur dan jenis. PJJ di Indonesia telah diterapkan pada sektor pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, maupun pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbagai organisasi yang ada di tanah air. PJJ di Indonesia menghadapi tantangan dalam pemanfaatan teknologi baru dalam masyarakat yang relatif masih rendah tingkat melek teknologi serta akses

terhadap teknologi itu sendiri. Penyelenggaraan PJJ di tanah air perlu mempertimbangkan teknologi tepat guna yang mudah terjangkau peserta didik yang tinggal di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kondisi yang berbeda. Pengguna layanan PJJ makin kritis terhadap kualitas layanan yang diberikan penyelenggara PJJ. PJJ di Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan dan kecenderungan mutakhir dalam praktik terbaik PJJ yang terjadi saat ini.

Akar Pertumbuhan, Konteks, dan Kebutuhan Pendidikan Jarak Jauh

Ketika Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka pada tahun 1945, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Kondisi itu menyulitkan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun bangsa. Disadari bahwa pendidikan merupakan unsur yang sangat penting untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kebodohan akibat penjajahan. Namun perang kemerdekaan yang berlangsung sekitar lima tahun menyebabkan pembangunan sektor pendidikan terabaikan. Pemerintah Republik Indonesia yang baru lahir disibukkan dengan mengatur strategi perang, baik melawan tentara Sekutu maupun Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, dan sekaligus mengupayakan tindakan nyata untuk membangun negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Perang Kemerdekaan berakhir setelah Pemerintah Belanda memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Sejak saat itu, Pemerintah mulai memikirkan pembangunan pendidikan di Indonesia sebagai sarana untuk melepaskan bangsa Indonesia dari kebodohan.

Meskipun dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun harus diakui bahwa pembangunan pendidikan bagi warga Indonesia bukan hal yang mudah. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia begitu luas, sedangkan tenaga terdidik hanya ada di kota-kota besar. Pada waktu itu, mereka adalah golongan terdidik yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga administrasi pegawai kolonial, administrasi perdagangan dan perkebunan milik kalangan swasta kolonial. Sebagian dari mereka adalah lulusan sekolah swasta yang didirikan bagi golongan masyarakat yang tidak mau mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial. Pada awal kemerdekaan, jumlah mereka sangat sedikit dan hanya berada di kota-kota besar. Sebagian besar rakyat Indonesia adalah golongan petani yang buta huruf.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dicari langkah terobosan. Pemerintah perlu mendidik calon guru dalam jumlah besar yang disiapkan untuk mendidik rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Karena keterbatasan dana dan tenaga, tidak semua calon guru dididik dengan sistem konvensional atau tatap muka. Sebagian dari mereka dididik melalui sistem korespondensi serta radio, yang kemudian dalam perkembangannya kini dikenal dengan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ).

Embrio PJJ di Indonesia diselenggarakan dalam bentuk sistem belajar korespondensi, sebagaimana halnya yang terjadi di beberapa negara lain di dunia. Meskipun demikian, secara resmi PJJ di Indonesia dimulai dengan didirikannya Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru (BKTPG) di Jl. Cipto No. 9 Bandung. Balai ini berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. F.503 tanggal 2 Juli 1950, dengan tugas menyelenggarakan kursus

tertulis bagi guru yang memiliki ijazah lebih rendah dari standar minimal persyaratan menjadi guru dan berminat meningkatkan kompetensinya untuk mencapai ijazah pendidikan guru seperti Sekolah Guru Bawah (SGB), Sekolah Guru Atas (SGA), Kursus B1, atau B2. Setelah lembaga pendidikan guru melalui jalur pendidikan formal dianggap memadai secara kuantitas di berbagai daerah di Indonesia, BKTPG kemudian dijadikan pusat pengembangan penataran guru jarak jauh dengan sistem belajar mandiri. Lembaga ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan status. Pada tahun 1967 BKTPG diubah namanya menjadi Pusat Penelitian Kurikulum, Metodik, dan Didaktik (PPKMD). Dengan perubahan nama itu, tugas dan fungsi lembaga ini mengalami perubahan pula. Lembaga ini tidak lagi menangani kursus tertulis bagi guru-guru, tetapi menyelenggarakan penelitian sesuai dengan namanya. Pada tahun 1970 PPKMD dikembalikan lagi fungsinya sebagai lembaga pendidikan guru, yang berada di bawah Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyelenggarakan kursus-kursus tertulis bagi guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Sesuai dengan fungsinya, pada tahun 1977 PPKMD berubah nama menjadi Balai Penataran Guru Nasional Tertulis (BPGNT), dengan tugas utama menyelenggarakan penataran penyegaran guru sekolah menengah pertama dan atas. Dua tahun kemudian namanya berubah lagi menjadi Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis (PPPG). Tugas pokok lembaga ini adalah menyelenggarakan penataran teknis pendidikan secara tertulis bagi guru di lingkungan pendidikan dasar dan menengah dengan mengembangkan materi serta cara penyajian untuk berbagai mata pelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Suwondo, 2003).

Keberadaan PPPG Tertulis dilatarbelakangi oleh kenyataan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam wilayahnya yang luas itu, banyak daerah terpencil tempat para guru mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Mereka tidak semua berasal dari sekolah guru. Sebagian dari mereka bahkan hanya memiliki latar belakang pendidikan yang sangat rendah dan tidak memiliki keterampilan serta kompetensi sebagai guru. Karena dedikasinya yang tinggi, mereka berhak untuk memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan dan profesionalismenya sebagai guru. Tetapi, mereka memiliki kesulitan untuk dapat mengikuti pendidikan formal sebagai guru karena kendala geografis, sosial, dan ekonomi. Secara geografis, mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengikuti pendidikan tatap muka dengan meninggalkan tempatnya mengajar di daerah terpencil. Sedangkan secara ekonomis, pengiriman para guru dari daerah terpencil ke tempat penataran tatap muka yang umumnya terdapat di kota besar di Indonesia akan memakan biaya yang besar (Suwondo, 2003). Karena itulah pemerintah membentuk lembaga yang diberi tugas menyelenggarakan kursus tertulis bagi mereka yang tidak dapat dijangkau melalui sistem pendidikan tatap muka.

Di samping PPPG Tertulis, pada tahun 1952 pemerintah mendirikan Radio Siaran Pendidikan (SRP). SRP didirikan karena adanya kebutuhan untuk penyelenggaraan pendidikan, terutama bagi anggota ex-tentara pelajar yang selama perang kemerdekaan meninggalkan bangku sekolahnya karena berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda, mereka berminat untuk kembali ke bangku sekolah. Mereka tidak mungkin kembali ke sekolah reguler, karena usianya sudah jauh di atas rata-rata murid yang tidak masuk kesatuan tentara pelajar. Pada umumnya mereka terlambat sekitar empat sampai lima tahun. Untuk menampung kebutuhan pendidikan

mereka, pada tahun 1952 Jawatan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan pendidikan melalui sistem siaran radio yang menyajikan pelajaran dengan sasaran utama bagi mereka yang tinggal di Jakarta. Sayangnya, sistem siaran ini berakhir begitu saja setelah diadakan pemusatan pendidikan bagi ex-tentara pelajar di kota Malang. Sejak tahun 1969 RSP kemudian difungsikan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan guru. Media radio ini dipilih karena media ini mampu menjangkau populasi pendengar yang lebih banyak secara jarak jauh dengan waktu yang lebih cepat (Habib, 1999). Selain itu, pengembangan program untuk media radio dan audio lebih murah bila dibandingkan dengan media lain, terutama televisi. Dari segi aksesibilitas, radio lebih aksesibel, karena warga negara Indonesia waktu itu lebih banyak yang memiliki radio dibandingkan dengan televisi. Di samping itu, program siaran radio secara eksperimental juga pernah diselenggarakan untuk menatar guru sekolah dasar di Jawa Tengah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Seni Suara selama tahun 1973-1976. Ketiga mata pelajaran itu kemudian diajarkan secara jarak jauh melalui siaran radio kepada siswa sekolah dasar di Yogyakarta.

Pada awal tahun 1980-an, sebuah lembaga swasta di Jakarta, yaitu Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) menyelenggarakan kursus/pelatihan dan pendidikan manajemen dengan sistem jarak jauh. Pelajaran yang diberikan kepada peserta kursus disampaikan secara tertulis (tercetak) dengan sistem moduler. Program-program yang ditawarkan lembaga ini banyak menarik kalangan swasta. PJJ terus tumbuh dengan pesat di berbagai sektor pendidikan. Di samping diterapkan pada sektor pendidikan formal, PJJ juga digunakan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan (Budimulia, Suparman & Romiszowsky, 1992).

Sejak tahun 1989, UT juga menyelenggarakan program pengembangan profesional berkelanjutan pada jenjang sertifikat, misalnya, program Bahasa Inggris yang bekerja sama dengan *Cambridge University*. Program-program pendidikan berkelanjutan ini terus dikembangkan, khususnya melalui kerja sama UT dengan berbagai instansi dan departemen pemerintah, maupun dengan pihak swasta. Perkembangan PJJ di tanah air telah diuraikan dalam beberapa publikasi selama beberapa tahun terakhir ini (Setijadi, 1987; Suparman, 1992; Siahaan, 1999; Pustekkom, 1999; Belawati, dkk., 1999; Suparman & Zuhairi, 2004; Asandhimitra, dkk., 2004). Secara lebih khusus berbagai perkembangan mutakhir PJJ di Indonesia diuraikan dalam bagian lain dalam makalah ini.

Konteks perkembangan PJJ di Indonesia tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan nasional serta dipengaruhi oleh berbagai kecenderungan perkembangan global dalam penerapan sistem PJJ dalam berbagai sektor pendidikan. PJJ di Indonesia memiliki sejarah panjang, dalam pengertian boleh dikatakan hampir sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau dan keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi, Indonesia menghadapi tantangan nyata untuk membangun sumber daya manusia (SDM) nasional berkualitas, berkompentensi tinggi, serta upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi lebih dari 220 juta warga negaranya.

Kondisi geografi, demografi, sosial ekonomi, ketersediaan teknologi tepat guna, serta budaya masyarakat telah mendorong penggunaan sistem PJJ dalam upaya meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan dalam berbagai jenjang, jalur, dan jenis. PJJ di Indonesia telah digunakan baik dalam pendidikan formal dan nonformal, pendidikan akademik maupun profesional, dan dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun

pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal. PJJ di Indonesia pun berkembang mengikuti zaman, mulai dari menggunakan bahan ajar cetak yang dikirimkan dengan sistem korespondensi kemudian diperkaya dengan pemanfaatan berbagai macam media dan kemudian akhir-akhir ini disemarakan dengan teknologi baru berbantuan komputer.

Sejalan dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, ekonomi dan teknologi yang amat pesat, paradigma pendidikan nasional bergeser secara progresif yang mengarah pada terciptanya sistem pendidikan nasional yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, akuntabilitas serta pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara NKRI dalam rangka menuju masyarakat belajar (Sidi, 2001). Pada jenjang pendidikan tinggi, semangat, visi, misi, kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan tinggi menuju pada cita-cita yang sama untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan menciptakan sistem pendidikan tinggi yang sehat, berkualitas, otonom, merata dan terjangkau warga belajar (Brojonegoro, 2003). Seiring dengan hakikat pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara, sistem pendidikan nasional dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan belajar dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan secara adil dan berkelanjutan. PJJ berkembang terus dan merupakan upaya konkret pengambil kebijakan nasional, kalangan profesi dan praktisi pendidikan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia modern berbasis pengetahuan sebagaimana diamanatkan oleh cita-cita kemerdekaan NKRI dan secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan dalam Penerapan Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia

Penerapan PJJ di berbagai sektor pendidikan ini menunjukkan fleksibilitas, daya tahan, serta prospek kelestarian sistem PJJ dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis program pendidikan dalam berbagai jalur dan jenjang. Bagi pemerintah, PJJ dipandang sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, menjangkau warga masyarakat di berbagai pelosok tanah air, serta menyediakan pendidikan berkualitas secara efisien bagi seluruh warga negara Indonesia di mana pun mereka berada. Bagi peserta didik, terutama orang dewasa yang sudah bekerja dan siapa saja yang tidak berkesempatan untuk mengikuti program pendidikan tatap muka karena berbagai alasan, PJJ memberikan kesempatan luas karena fleksibilitas yang ditawarkannya.

Kepercayaan masyarakat, keyakinan pemerintah, dan pembuat undang-undang tentang manfaat dan kontribusi nyata PJJ dalam membantu mencerdaskan bangsa dinyatakan secara eksplisit dalam perundang-undangan yang baru saja selesai disusun, yaitu *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*. Hal ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah perundang-undangan sistem pendidikan nasional, karena sebelumnya PJJ hanya disebut dalam salah satu ayat secara singkat dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Ini berarti bahwa dalam 14 tahun terakhir ini PJJ menunjukkan perkembangan yang pesat dalam teori, praktik, kredibilitas maupun fondasi legalitas. Bagian Kesepuluh Pasal 31 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* secara khusus berkaitan dengan PJJ. Mengutip Undang-Undang tersebut,

terdapat 4 ayat dalam Pasal 31 yang secara spesifik mengakomodasi PJJ, yaitu sebagai berikut.

- a. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- b. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- c. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rumusan tentang PJJ secara khusus dan eksplisit dalam *Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional* memperkuat landasan hukum dan perundang-undangan yang mengatur PJJ, mengingat hal tersebut belum pernah tertera secara lengkap dalam undang-undang sebelumnya berikut peraturan pemerintah yang menyertainya. Sebagai tindak lanjut dari pasal 31 tersebut, pemerintah sedang menyusun *Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Jarak Jauh*, sehingga kedudukan PJJ menjadi semakin kokoh, kepercayaan masyarakat makin meningkat, dan kepentingan pengguna serta pihak terkait dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya. Peraturan Pemerintah ini diharapkan secara lebih rinci mengatur pelaksanaan PJJ dalam berbagai sektor pendidikan sehingga layanan PJJ yang berkualitas dapat disediakan oleh institusi yang menyelenggarakannya. Bagi penyelenggara PJJ, keberadaan Peraturan Pemerintah yang tegas, kokoh dan yang kemudian dijabarkan dalam berbagai Keputusan Menteri terkait secara konkret memberikan kepastian

hukum serta memudahkan operasionalisasinya sehingga institusi penyelenggara PJJ dapat mengembangkan program PJJ berkualitas sesuai dengan rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang PJJ ini hendaknya memperhatikan pula perkembangan yang terkait dengan globalisasi dan transnasionalisasi pendidikan, serta praktik institusi penyelenggara PJJ di luar negeri yang menyediakan layanan belajar melalui sistem PJJ bagi warga negara Indonesia.

Kelahiran PJJ didorong oleh adanya kesenjangan antara tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Kesenjangan itu dalam berbagai hal diatasi dengan penyelenggaraan PJJ yang secara umum disebut pula belajar terbuka, pendidikan terbuka, pendidikan korespondensi, atau pendidikan melalui udara. Meskipun demikian, dalam berbagai hal sistem PJJ berkembang karena didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bentuk tradisional, belajar jarak jauh diselenggarakan dengan sistem yang sederhana melalui surat menyurat atau bahan-bahan tercetak yang dikirim kepada mahasiswa. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dimungkinkan karena adanya teknologi percetakan. Dalam bentuknya yang modern, perkembangan PJJ didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. PJJ terbukti berperan nyata dalam upaya pengembangan manusia Indonesia yang cerdas dan berpengetahuan. PJJ telah dipraktikkan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, serta pelatihan dan pengembangan SDM.

Sekalipun PJJ di Indonesia telah ada sepanjang sejarah modern Indonesia pascakemerdekaan, penerapan PJJ secara lebih intensif terlaksana semenjak tahun 1970-an, ketika NKRI mendapatkan rejeki besar dari minyak bumi sehingga mampu membiayai pembangunan

dalam bidang pendidikan dalam skala besar. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat mendanai berbagai inovasi dalam bidang PJJ, siaran pendidikan dan pengembangan bahan ajar cetak untuk belajar mandiri pada tingkat sekolah dasar (Setijadi, 1987). Pada tahun 1973-1976, Indonesia dengan bantuan UNESCO menyelenggarakan eksperimentasi program radio untuk menatar guru sekolah dasar di Jawa Tengah dalam Bahasa Indonesia, IPS dan Seni Suara dan mengajarkan mata pelajaran tersebut kepada siswa sekolah dasar di Yogyakarta. Kemudian, penataran guru melalui radio diperluas ke sebelas propinsi termasuk Jawa Tengah dan Yogyakarta sejak 1976. Masih dalam dasawarsa 1970-an, pada tingkat sekolah dasar dikembangkan sistem PAMONG (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orangtua, dan Guru) untuk anak-anak yang putus sekolah dasar atau anak-anak usia sekolah dasar yang tidak tertampung di sekolah dasar biasa. Selanjutnya, penggunaan satelit domestik untuk komunikasi semenjak tahun 1974 berdampak positif pada pembangunan bidang pendidikan. Misalnya, pada tahun 1978, pemerintah mendirikan Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) dan lima buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka guna memberikan kesempatan luas kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan menengah secara tatap muka.

Pada dasawarsa 1970-an, kebutuhan untuk meningkatkan mutu guru sangat tinggi, sementara mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaannya sebagai guru yang jumlahnya waktu itu masih sangat kecil. Siaran radio mengambil peran sebagai medium peningkatan kualitas guru. Melalui siaran radio ini diharapkan ada pemerataan mutu guru, baik yang di kota-kota maupun di daerah terpencil. Pada tahun 1973 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meresmikan sistem siaran radio pendidikan untuk penataran guru SD. Kemudian Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Pustekkom juga menyelenggarakan SMP Terbuka.

Sejatinya kontribusi PJJ dalam pendidikan guru dalam jabatan di Indonesia sangat penting dari dulu sampai saat ini dan pada masa mendatang. Pendidikan guru dalam jabatan memiliki peran strategis, mengingat guru selalu berperan sebagai garda terdepan dalam pengembangan manusia seutuhnya. Sejarah dan cikal bakal PJJ tidak dapat dipisahkan dari pendidikan guru karena PJJ didorong oleh kebutuhan peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan yang bekerja di berbagai jenjang pendidikan dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sejarah pendidikan guru dalam jabatan dengan sistem jarak jauh sudah berlangsung lama dan merupakan cikal bakal PJJ di Indonesia. Pada tahun 1955, program pendidikan dengan sistem korespondensi dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Program ini bersifat teoretis sehingga dimungkinkan menggunakan bahan-bahan korespondensi dan ujian tertulis. Keluaran program ini adalah setingkat diploma yang dapat digunakan para guru untuk meningkatkan karier atau profesi keguruan mereka. Namun demikian program ini tidak berlangsung lama (Setijadi, 1987).

Pada tahun 1976, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membentuk Tim Eksekutif Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan dengan tugas antara lain menyelenggarakan siaran radio pendidikan untuk peningkatan kualitas guru, dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dibantu oleh Kepala Balai Produksi Media Radio di Semarang, Kepala Balai Produksi Media Radio di Yogyakarta, dan Balai Produksi Media Televisi di Surabaya. Di samping itu, Kepala Pustekkom dibantu oleh Seksi Produksi dan Distribusi, Subseksi Penelitian dan Pengembangan, serta Subseksi Evaluasi dan Sanggar. Penemuan penelitian menunjukkan bahwa PJJ bagi guru dalam jabatan merupakan cara yang efisien bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas angkatan kerja guru (Nielsen & Totto, 1993).

Di samping program-program yang ditawarkan lembaga-lembaga pendidikan formal seperti yang disebutkan di atas, di Indonesia telah berkembang pula program-program PJJ, misalnya Kursus Manajemen Multimedia oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM –sejak 1979), program perbankan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) yang sekarang menjadi Institut Bankir Indonesia (IBI –sejak 1985), program Bina Keluarga Balita oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, (sejak 1987), program penataran petugas lapangan keluarga berencana oleh BKKBN (sejak 1987), program-program untuk karyawan Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel –sejak 1990), dan program Penyetaraan DII Guru Agama oleh Departemen Agama (juga sejak 1990). Program PJJ lembaga-lembaga tersebut menggunakan media cetak dan kaset audio. Beberapa lembaga lain berupaya mempersiapkan pelaksanaan PJJ, antara lain PT Pos Indonesia dan Departemen Kesehatan.

PJJ banyak diterapkan oleh instansi pemerintah, terutama beberapa departemen pemerintah yang memiliki pusat pendidikan dan pelatihan pegawai, untuk melatih, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi SDM-nya. Beberapa departemen yang dimaksud adalah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan sebagainya (Pustekkom, 1999a).

PJJ di Indonesia mengalami perkembangan yang menggembirakan dengan berbagai inovasi, prakarsa serta praktek pendidikan yang membuahkan hasil konkret dalam upaya membangun SDM nasional. Sekalipun demikian, pendokumentasian perkembangan PJJ di tanah air masih kurang menggembirakan sampai dengan penghujung akhir abad ke-20, karena terbatasnya forum publikasi yang

mendokumentasikan hasil penelitian, inovasi maupun praktek terbaik PJJ di tanah air. Hal ini terlihat nyata dari terbatasnya publikasi dan diseminasi informasi tentang PJJ di tanah air. Akan tetapi, mulai awal abad ke-21, diseminasi informasi tentang PJJ mendapatkan semangat baru dengan makin maraknya forum dan publikasi ilmiah dalam PJJ.

Universitas Terbuka (UT) sebagai pusat unggulan PJJ, khususnya dalam jenjang pendidikan tinggi, memberikan banyak kontribusi dalam hal ini, dengan dirintisnya penerbitan *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh* mulai tahun 2000. Jurnal yang diterbitkan dua kali setahun ini menyebarkan informasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan PJJ di Indonesia. Sebelumnya, penerbitan buku tentang PJJ telah dirintis sejak tahun 1999 (Belawati, dkk, 1999). Dan selanjutnya UT terus mengambil tindakan nyata dalam publikasi tentang PJJ melalui penerbitan buku setiap tahun secara teratur yang secara khusus menyajikan temuan penelitian, inovasi, gagasan baru, serta praktik terbaik dalam PJJ (Suparman & Zuhairi, 2004; Asandhimitra, dkk, 2004). Forum seminar nasional teknologi pembelajaran memperkaya pula khasanah dan wacana PJJ (Padmo, dkk, 2003). Semakin banyaknya publikasi tentang PJJ ini merupakan hal yang sangat positif dalam membantu mendokumentasikan perkembangan, wacana teori serta praktik PJJ dan membantu para peneliti dan pemerhati PJJ dalam mengarahkan dan memimpin perkembangan PJJ ke depan.

Penerapan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada tingkat sekolah dasar, dikembangkan sistem PAMONG (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orangtua, dan Guru) untuk anak-anak

yang putus sekolah dasar atau anak-anak usia sekolah dasar yang tidak tertampung di sekolah dasar biasa. Sistem PAMONG adalah salah satu contoh penerapan PJJ pada jenjang pendidikan dasar. Dalam sistem ini, para peserta didik setelah Kelas IV SD belajar secara mandiri dari paket bahan ajar yang disediakan pemerintah. Sistem ini menghendaki keterlibatan orang tua dan masyarakat sebagai sumber belajar dalam membantu proses belajar peserta didik. Di samping itu, Program Paket A pada tingkat Sekolah Dasar telah lama diselenggarakan dengan menerapkan sistem PJJ.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Terbuka memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses pada pendidikan menengah bagi siswa yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan menengah tatap muka. Gagasan SLTP Terbuka dikemukakan pada tahun 1977, kemudian proyek percobaan baru dimulai pada tahun 1979 (Siahaan, 1999). SLTP Terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan luas kepada lulusan Sekolah Dasar yang tidak dapat mengikuti pendidikan menengah tatap muka karena hambatan geografis dan sosial ekonomis. Di samping itu, Program Paket B pada tingkat Sekolah Menengah Pertama telah lama diselenggarakan dengan menerapkan sistem PJJ.

Tercapainya pendidikan dasar universal dan pernyataan kebijakan wajib belajar sembilan tahun pada tahun 1994 membawa dampak positif pada penerapan PJJ pada tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. SLTP Terbuka yang sebelumnya bersifat eksperimental berubah menjadi pilihan utama untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Dengan demikian, pemerataan kesempatan dan akses pada SLTP meningkat tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran (Pustekkom, 1999).

SLTP Terbuka dirancang untuk memenuhi kebutuhan para lulusan sekolah dasar yang kurang beruntung, karena kendala geografis

maupun sosial ekonomi, sehingga tidak memiliki akses pada SLTP tatap muka. SLTP Terbuka dapat menjangkau siswa yang tinggal di daerah pedesaan maupun perkotaan karena sistem pembelajaran dirancang untuk menyediakan fleksibilitas bagi siswa. Sistem ini memungkinkan pula pemanfaatan secara efektif sumber daya pembelajaran yang tersedia di masing-masing daerah, termasuk sarana dan prasarana sekolah, SDM, serta sumber belajar lainnya.

Sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pendidikan dasar dan menengah nasional, SLTP Terbuka mengikuti kurikulum dan kriteria penilaian yang sama dengan SLTP reguler tatap muka. Namun demikian, sesuai dengan kaidah dan metode PJJ, SLTP banyak menggunakan bahan ajar cetak mandiri, didukung oleh media audiovisual seperti kaset audio, siaran radio, *slide* serta program video dan siaran televisi. Bantuan belajar diberikan oleh Guru Bina dan Guru Pamong. Guru Bina adalah guru ahli dalam bidang studi masing-masing, sedangkan Guru Pamong berperan sebagai fasilitator yang membantu mengorganisasi kegiatan pembelajaran siswa di lokasi masing-masing. Siswa SLTP Terbuka belajar secara mandiri selama paling sedikit 3 jam sehari di sekolah atau sarana umum yang ada di dekat tempat tinggal mereka. Seminggu sekali Guru Bina mengadakan pertemuan tatap muka dengan para siswa SLTP Terbuka di SLTP reguler tempat Guru Bina sehari-hari mengajar (Pustekkom, 1999).

SMP Terbuka dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan menengah formal pertama di Indonesia yang menerapkan sistem PJJ. SMP Terbuka diselenggarakan karena adanya ledakan lulusan SD Inpres yang dibuka pada tahun 1973/1974. Angka buta huruf waktu itu masih sangat tinggi, sedangkan kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak usia sekolah masih sangat terbatas. Perluasan kesempatan belajar sebagaimana diamanatkan UUD 1945 telah mendorong pemerintah memperluas daya tampung sekolah dasar dengan

mengeluarkan kebijakan SD Inpres. Dampak kebijakan tersebut adalah meledaknya lulusan sekolah dasar pada awal Pelita III yang besarnya mencapai 2.546.000 orang siswa. Hal itu menimbulkan masalah baru dalam pemberian kesempatan belajar bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan di tingkat SLTP, mengingat daya tampung SLTP yang ada hanya sekitar 71,1 persen. Pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk memperluas daya tampung dengan menggunakan sistem belajar kelas, baik untuk menyediakan ruang-ruang kelas, fasilitas belajar, maupun tenaga pengajarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, didirikanlah SMP Terbuka.

Pendirian SMP Terbuka diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar terhadap lulusan sekolah dasar dan lulusan madrasah ibtidaiyah yang tidak dapat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikannya pada sekolah menengah pertama tatap muka karena alasan sosial, ekonomi, dan geografis. Sistem pendidikan ini diselenggarakan dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia seperti guru, ruang belajar, dan fasilitas belajar. Karena itu SMP Terbuka dapat dikembangkan relatif lebih cepat tanpa menuntut ketersediaan guru dan ruang kelas baru.

Karena sifatnya memanfaatkan sumber yang tersedia, SMP Terbuka didirikan dengan memanfaatkan gedung dan tenaga pengajar yang terdapat pada salah satu SLTP Negeri yang disebut sebagai sekolah induk. Setiap SMP Terbuka memiliki beberapa Tempat Kegiatan Belajar (TKB). Kepala Sekolah SMP Terbuka adalah dari Kepala Sekolah dari SMP induknya, demikian juga wakil kepala sekolahnya. Dalam struktur SMP Terbuka, selain kepala dan wakil kepala sekolah, juga ada guru bina, guru pamong, guru pamong khusus, guru bimbingan dan penyuluhan, dan tenaga administrasi. Guru bina, guru bimbingan dan penyuluhan, dan tenaga adminis-tratif diambil dari guru sekolah induk, sedangkan guru pamong diambil dari guru sekolah dasar atau tokoh masyarakat yang bertugas

membantu guru bina dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di tempat kegiatan belajar. Guru pamong khusus adalah anggota masyarakat yang memiliki keterampilan khusus, keahlian, atau pengetahuan yang tidak terdapat dalam kurikulum, tetapi dianggap bermanfaat bagi siswa.

Pada awalnya SMP Terbuka diselenggarakan di lima wilayah, yang disebut dengan:

- SMP Terbuka Kalianda, Lampung Selatan, Propinsi Lampung
- SMP Terbuka Plumbon, Cirebon, Propinsi Jawa Barat
- SMP Terbuka Adiwerna, Tegal. Propinsi Jawa Tengah
- SMP Terbuka Kalisat, Jember, Propinsi Jawa Timur, dan
- SMP Terbuka Terara, Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan SMP Terbuka di lima wilayah itu dianggap berhasil sehingga dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang mulai dicanangkan pada tahun 1994. Pemerintah kemudian mendirikan SMP terbuka di hampir seluruh propinsi di Indonesia. Pada tahun 1999, jumlah SMP Terbuka di seluruh Indonesia yang telah berdiri mencapai 3773 lokasi dengan 9721 tempat kegiatan belajar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Almunawar, 1999).

PJJ juga diterapkan dalam konteks pendidikan keagamaan dengan pendirian Madrasah Tsanawiyah Terbuka untuk menampung para santri pada berbagai pondok pesantren tatap muka. Sistem pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Terbuka memungkinkan para santri tetap menuntut ilmu agama pada pesantren tatap muka dan belajar pengetahuan umum melalui Madrasah tersebut dengan memanfaatkan sumber belajar dan tokoh masyarakat setempat sebagai fasilitator. Statistik menunjukkan bahwa di Indonesia tercatat 8.991 Pondok Pesantren dengan jumlah peserta didik sekitar 2 juta

santri, 70% di antaranya berada dalam kelompok usia 13-15 tahun (Pustekkom, 1999).

Inovasi dalam PJJ untuk tingkat pendidikan menengah tingkat atas telah dirintis sejak tahun 1999 (Ibrahim, 2003). SMU Terbuka dipandang sebagai sebuah alternatif layanan pendidikan umum untuk memberikan kesempatan bagi para lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama yang tidak dapat mengikuti program pendidikan tatap muka. Uji coba perintisan SMU Terbuka dilakukan mulai tahun 2002 pada tujuh SMU sebagai berikut, (1) SMU Negeri 1 Leuwiliang, Jawa Barat, (2) SMU Negeri 1 Moga, Jawa Tengah, (3) SMU Negeri Rupert, Riau, (4) SMU Negeri 9 Samarinda, Kalimantan Timur, (5) SMU Negeri 1 Bungoro, Sulawesi Selatan, (6) SMU Negeri 19 Surabaya, Jawa Timur, dan (7) SMU Negeri Kepanjen, Jawa Timur (Ibrahim, 2003). Di samping itu, Program Paket C pada tingkat Sekolah Menengah Umum telah lama diselenggarakan dengan menerapkan sistem PJJ. Inovasi dalam penyelenggaraan SMU Terbuka ini masih perlu terus dievaluasi efektivitasnya, sekalipun pengalaman negara lain menunjukkan bahwa sistem ini dapat diterapkan secara efektif bagi para peserta didik yang tinggal di daerah terpencil dan sulit menjangkau sistem persekolahan tatap muka.

Penerapan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi

Pada tahun 1980, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menyelenggarakan *sistem PJJ melalui satelit* (Sisdiksat) untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Indonesia Timur. Sisdiksat diharapkan dapat mengatasi kelangkaan tenaga pengajar dan bahan perkuliahan yang berkualitas di wilayah Kalimantan,

Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Sisdiksat diselenggarakan melalui jaringan komunikasi satelit dan papan tulis tele sehingga pengajar yang berada di suatu tempat (Dikti) dapat mengirim tulisan dan berbicara timbal balik dengan dosen atau mahasiswa yang tersebar di universitas/institut di wilayah Indonesia Timur tersebut. Mata kuliah yang diajarkan melalui Sisdiksat adalah mata kuliah yang langka tenaga pengajarnya dan umumnya dalam bidang pertanian (Suparman & Zuhairi, 2004). Dengan sistem PJJ ini, dosen atau narasumber dari Jakarta dapat berkomunikasi secara interaktif dengan dosen-dosen lain per kelas di beberapa wilayah di Indonesia Timur. Setelah UT berdiri, fasilitas Sisdiksat juga dimanfaatkan oleh UT untuk sarana tutorial bagi mahasiswa UT yang berada di Indonesia Timur.

Pada tahun 1981, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program PJJ D-II Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Program ini diperuntukkan guru SLTP yang telah mempunyai ijazah D-I atau PGSMMP. Tenaga pendidik sekolah tingkat lanjutan pertama itu awalnya direkrut dari guru-guru yang berpendidikan sangat minim sehingga perlu ditingkatkan pendidikannya bagi mereka yang telah mengajar paling sedikit tiga tahun, ke tingkat yang lebih tinggi, setingkat D-II. Pada waktu itu masalah yang dihadapi untuk mendidik guru-guru tersebut adalah tidak ada guru pengganti yang menggantikan posisi mereka mengajar, jika mereka mengikuti pendidikan lanjutan. Karena itulah mereka kemudian dididik dengan sistem jarak jauh yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, PJJ untuk guru sekolah lanjutan tingkat pertama itu tidak menginduk pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Pendidikan tersebut langsung diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai proyek Direktorat Jenderal itu.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada pendidikan Akta Mengajar V. Pada tahun 1982 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan PJJ untuk Akta V. Pendidikan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar dosen-dosen di perguruan tinggi. Pendidikan Akta V inipun tidak menginduk kepada salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia waktu itu, tetapi diselenggarakan sebagai proyek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kondisi seperti itu ikut mendorong pemerintah mendirikan UT. Setelah UT berdiri, kedua proyek PJJ yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu dialihkan ke UT.

Peningkatan Kualitas, Pemanfaatan Teknologi Baru dan Pendirian Asosiasi Profesi

Penerapan sistem jaminan kualitas dalam PJJ sejalan dengan makin meningkatnya kecenderungan global dan kepedulian terhadap kualitas dari kalangan pengguna jasa dan pihak yang berkepentingan. Kualitas sudah menjadi perhatian masyarakat pendidikan nasional sejak lama, boleh jadi semenjak sistem pendidikan modern diperkenalkan di negeri ini, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Kualitas telah menjadi agenda, visi maupun misi sistem pendidikan nasional. Namun demikian, upaya konkret penerapan sistem jaminan kualitas modern sebagaimana telah diterapkan di berbagai kalangan industri dan jasa baru akhir-akhir ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di tanah air. Pada tahun 2003, pemerintah Republik Indonesia

melalui Departemen Pendidikan Nasional mendirikan Lembaga Penjamin Kualitas Pendidikan (LPMP) di setiap propinsi yang ada di tanah air, Institusi PJJ dapat menerapkan prinsip jaminan kualitas ISO (*International Standard Organistation*) sebagaimana diprktikkan kalangan industri dengan menerapkan sistem seperti ISO 9000, ISO 14000 Dalam konteks nasional, institusi PJJ dapat mengundang lembaga akreditasi nasional sebagai penilai eksternal, seperti LPMP atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Selain itu, institusi PJJ dapat pula mendapatkan sertifikasi kualitas dan akreditasi dari lembaga pendidikan jarak jauh internasional seperti *International Council for Open and Distance Education (ICDE)*.

Dalam PJJ, karena terbatasnya jumlah, jenis dan jenjang institusi yang menerapkan sistem PJJ, tidak banyak hal yang dapat dilaporkan dalam penerapan sistem PJJ. Namun demikian, UT sebagai institusi pendidikan tinggi jarak jauh telah banyak memberikan kepeloporan dalam penerapan sistem jaminan kualitas dalam PJJ. Jaminan kualitas menganut prinsip perbaikan berkelanjutan sehingga upaya peningkatan kualitas dilakukan secara terus menerus. Kualitas sudah semestinya menjadi budaya kerja SDM dan institusi PJJ di tanah air sehingga institusi dapat memberikan layanan berkualitas dan pada akhirnya menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu bersaing dalam kancah global.

Perhatian terhadap kualitas PJJ telah dirintis UT dengan penerapan sistem jaminan kualitas (SIMINTAS) sebagai upaya perbaikan kualitas layanan dan penyelenggaraan PJJ secara menyeluruh pada institusi tersebut (UT, 2002). Kebijakan kualitas dilandasi oleh Rencana Operasional yang secara eksplisit menyatakan kualitas sebagai pijakan dan fokus arah pergerakan institusi ke depan sehingga sumber daya yang terdapat pada institusi PJJ tersebut dikerahkan untuk meningkatkan kualitas (UT, 2001). Rencana Operasional ini merupakan operasionalisasi visi dan misi institusi

yang juga secara tegas dan eksplisit mengutamakan prioritas dan fokus pengembangan pada kualitas akademik, kualitas partisipasi mahasiswa dan kualitas manajemen internal.

Pemanfaatan teknologi baru dalam PJJ di Indonesia terkait dengan kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta prospek dan potensi pemanfaatannya di Indonesia. PJJ melibatkan pemanfaatan media tepat guna secara substansial karena terpisahnya jarak antara pendidik dan peserta didik menghendaki peran sentral media dalam menyampaikan bahan ajar. Teknologi dan media yang dimanfaatkan PJJ di Indonesia berkembang, sejalan pula dengan perkembangan teknologi tersebut, mulai dari berbasis korespondensi, berbasis media, kemudian berbasis TIK. PJJ yang dimulai pada tahun 1950-an banyak tergantung pada pemanfaatan media korespondensi atau tertulis sehingga hal ini tercermin dalam nama institusi penyelenggaranya, yang disebut dengan Badan atau Pusat Pengembangan dan Penataran Guru Tertulis. Sekalipun demikian siaran radio telah banyak dimanfaatkan pula. Dasawarsa 1970-an ditandai dengan peningkatan penggunaan PJJ berbasis aneka media atau multi media dengan memanfaatkan siaran radio, pita rekam, dan siaran televisi.

Kondisi geografis dan demografis Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi dan media secara intensif, sekalipun pemanfaatan teknologi baru masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terkait dengan masalah ketersediaan prasarana dan sarana, akses serta tingkat literasi peserta didik PJJ. Dalam dasawarsa 1990-an, gagasan pengembangan dan penerapan teknologi baru dalam PJJ, terutama pada pendidikan tinggi, dipelopori dengan pengembangan prasarana informasi akademik di tanah air (Purbo, Soegijoko, Ahmad & Merati, 1998). Kemudian, mulai dasawarsa 2000-an, beberapa inovasi pemanfaatan teknologi dalam PJJ pada jenjang pendidikan tinggi di tanah air dilakukan dengan melibatkan pemanfaatan jaringan untuk

membantu proses belajar, menciptakan lingkungan belajar berbantuan komputer, serta menggunakan program televisi melalui satelit siaran langsung bagi dosen perguruan tinggi di Indonesia (Belawati, 2000; Padmo, Huda & Belawati, 2000; Suradijono, Nazief, Subagdja & Moningka, 2000). Pemanfaatan TIK dalam PJJ terus dikembangkan dengan eksplorasi dan penerapan sistem manajemen dan pembelajaran berbasis internet sebagaimana telah dirintis oleh UT dan beberapa perguruan tinggi di tanah air (Anggoro, Hardhono, Belawati & Damayanti, 2001; Andriani, dkk., 2003; Anggoro, 2004).

Negara sebesar Indonesia dengan penerapan PJJ dalam skala besar sewajarnya memiliki organisasi dan institusi yang kokoh dalam PJJ. Pembentukan organisasi nasional dalam PJJ telah dirintis semenjak tahun 1993 dengan pendirian *Indonesian Distance Learning Network (IDLN)*. Organisasi ini menghimpun anggota dari berbagai sektor, instansi pemerintah maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan dalam menerapkan dan memajukan PJJ di tanah air untuk mengembangkan SDM yang dimilikinya (Pustekkom, 1999).

SDM merupakan bagian terpenting dalam setiap inovasi dan kelestarian suatu institusi PJJ. Institusi PJJ yang baik memberikan perhatian dan prioritas tinggi terhadap pengembangan dan pembinaan SDM. Pada institusi PJJ yang relatif sudah mapan, berbagai upaya konkret telah dilakukan untuk mengembangkan SDM PJJ yang kompeten dan berkualifikasi tinggi. Terlebih lagi dalam PJJ, kompetensi, kategori dan jenis SDM sangat beragam. Karena sifat PJJ yang umumnya menghendaki terbinanya jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, SDM PJJ pun ada yang bekerja penuh waktu dan paruh waktu.

Pengembangan dan pembinaan SDM PJJ telah dilakukan secara terus menerus melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dan nonformal, serta melalui berbagai forum seminar, diskusi dan

tukar pikiran ilmiah. Satu perkembangan penting dalam pembinaan profesi PJJ baru-baru ini adalah pembentukan Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia (APPJJI) pada tanggal 30 Maret 2004. Asosiasi profesi seperti ini diharapkan banyak berperan dalam membina dan mengembangkan profesi PJJ, dan secara lebih luas lagi memajukan PJJ di tanah air. APPJJI didirikan dengan landasan pemikiran bahwa tindakan konkret perlu dilakukan untuk lebih memasyarakatkan PJJ di tanah air, meningkatkan sinergi kalangan profesional dan lembaga penyelenggara PJJ, meningkatkan serta menjaga standar mutu pendidikan. Asosiasi ini diharapkan mampu berperan aktif dalam pengembangan PJJ melalui berbagai kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan dan diseminasi informasi tentang PJJ di tanah air.

Simpulan

PJJ di Indonesia berkembang pesat sejalan dengan meningkatnya layanan pendidikan berkualitas yang diperlukan masyarakat. PJJ berkembang dari segi kuantitas dan kualitas peserta didik maupun institusi penyelenggara. PJJ dalam pendidikan formal semakin banyak digunakan untuk menjangkau peserta didik yang tidak dapat mengikuti sistem pendidikan tatap muka. Dalam pendidikan non-formal, semakin banyak jenis program dan institusi yang menyelenggarakan PJJ, misalnya dalam bentuk program pengembangan profesional.

Sejalan dengan perubahan sosial yang mengarah pada pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan, pemenuhan kebutuhan belajar sepanjang hayat, serta tuntutan akses universal terhadap pendidikan pada berbagai jenjang, jalur dan jenis, PJJ memiliki peran strategis untuk memberikan respons terhadap berbagai tantangan yang saling terkait tersebut. Pemerintah dan pihak yang berkepentingan tidak

dapat memandang sebelah mata potensi PJJ dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan warga masyarakat dan mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan.

PJJ merupakan upaya pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM yang berkembang secara dinamis di tanah air. Jumlah institusi, peserta didik serta ragam program PJJ yang ditawarkan berkembang dan bertambah terus sejalan dengan kebutuhan warga masyarakatnya. PJJ tidak lagi dipandang sebagai upaya sampingan yang dilakukan sambil lalu untuk meningkatkan pemasukan finansial institusi guna menutup anggaran pengeluaran institusi penyelenggaranya. PJJ memiliki kedudukan yang kukuh secara legal sebagaimana dinyatakan secara jelas dan tegas dalam bagian kesepuluh Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PJJ merupakan sistem pendidikan yang memiliki landasan teoretik, empiris, serta pengalaman praktik terbaik yang teruji di seluruh dunia. Profesi dalam PJJ di tanah air merupakan profesi yang bergengsi, yang memerlukan keahlian yang sangat spesifik, kompetensi yang khusus, memberikan imbalan yang wajar, serta memiliki prospek perkembangan masa depan yang cerah baik bagi praktisi maupun teoritis. □

Daftar Pustaka

- Almunawar, M. 1999. 'Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTP Terbuka): alternatif pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Diknas)'. Dalam Belawati, T. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Andriani, D., dkk. (ed.). 2003. *Cakrawala Pendidikan: E-learning*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Anggoro, M. T. 2004. 'Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan tinggi jarak jauh'. Dalam Asandhimitra, (ed.). *Pendidikan Tinggi Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Anggoro, M. T., Hardhono, A. P., Belawati, T. & Damayanti, T. 2001. 'Tutorial elektronik melalui internet dan fax-internet'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 2(1):60-77.
- Asandhimitra, (ed.). 2004. *Pendidikan Tinggi Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Belawati, T. 2000. 'Enhancing learning in distance education through the world wide web'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 1(1):1-12.
- Belawati, T., dkk. (ed.). 1999. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Brojonegoro, S. S. 2003. *Higher education long term strategy 2003 – 2010*. Jakarta: Directorate General of Higher Education, Ministry of National Education.
- Brotosiswoyo, B. S. 1996. *Catatan Akhir 4 Tahun Masa Bakti Rektor Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Habib, Z. 1999. 'Siaran radio pendidikan: embrio pendidikan terbuka di Indonesia'. Dalam T. Belawati, dkk. (ed.) *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ibrahim, N. 2003. 'SMU Terbuka: sebuah alternatif layanan pendidikan tingkat sekolah menengah umum'. Dalam D. Padmo, dkk. (ed.). *Teknologi Pembelajaran Upaya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Nielsen, H. D. & Tatto, M. T. 1993. 'Teacher upgrading in Sri Lanka and Indonesia'. Dalam H. Perraton (ed.), *Distance Education for Teacher Training*. London: Routledge.
- Padmo, D., dkk. (ed.). 2003. *Teknologi Pembelajaran Upaya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Padmo, D., Huda, N. & Belawati, T. 2000. 'Pemanfaatan program televisi melalui satelit siaran langsung (TV-SSL) di Indonesia: persepsi dan kesediaan dosen perguruan tinggi negeri/swasta'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 1(1):58-67.
- Purbo, O. W., Soegijoko, S., Ahmad, I. & Merati, W. 1998. 'Indonesian academic information infrastructure'. *Jurnal Studi Indonesia*, 8(1): 14-35.
- Pustekkom. 1999. *Distance Learning for Basic Education in Indonesia*. Jakarta: Pustekkom.
- Pustekkom. 1999a. *Jaringan Sistem Belajar Jarak Jauh Indonesia*. Jakarta: Pustekkom.
- Setijadi. 1987. 'Distance education in Indonesia'. Dalam ADB (ed.), *Distance education in Asia and the Pacific*. Manila: Asian Development Bank (ADB).
- Siahaan, S. 1999. 'Open and distance education in Indonesia'. Paper presented at the Third SEAMOLEC GB Meeting. Tersedia melalui <http://www.seamolec.or.id> pada 1 March 2004.
- Sidi, I. D. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Paramadina.
- Suparman, A. 1992. *Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta: PAU-PPAI Universitas Terbuka.

- Suparman, A. & Zuhairi, A. 2004. *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suradijono, S. H., Nazief, B., Subagdja, B. & Moningga, J. 2000. 'Developing individual and collaborative learning environment: Melati's experience'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 1(1):68-82.
- Suwondo. 2003. 'PPPG Tertulis Bandung'. Dalam D. Supriyadi (ed.), *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuang-annya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Universitas Terbuka. 2000. *Evaluasi Diri Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. 2001. *Rencana operasional Universitas Terbuka, 2001-2005*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. 2002. *Sistem Jaminan Kualitas (SIMINTAS) Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.